

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa)

Fatkhul Jannah¹, Eka Ardiansyah²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Teknologi Sumbawa

jannah0398@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Hasil penelitian dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poto telah transparan dan akuntabel meskipun dalam praktiknya masih terdapat indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstract

This research aims to analyze how the transparency and accountability of village financial management of Poto village, Moyo Hilir, Sumbawa Regency based on Regent Regulation Number 14 of 2017 about Village Financial Management. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data sources in this research are primary data and secondary data with data collection methods using interview technique, documentation, observation, and triangulation. The result of this research based on Regent Regulation Number 14 of 2017 about Village Financial Management, indicated that the management of village financial in Poto village was already accountable and transparent although in practice there are still some indicators that are not accordance with the Regent Regulation.

Kata Kunci : Transparency, Accountability, Village Financial Management.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah maka sistem pemerintahan telah beralih dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan desentralisasi pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya daerah yang tersedia. Pada dasarnya, adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan (Herybertus,2018).

Desa merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah Pusat memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa, tujuannya untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan desa. Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peran besar dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karenanya, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. Sehingga semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dalam tata kelola pemerintahannya desa dituntut pula untuk menerapkan prinsip transparansi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dalam mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 4 aspek yang menjadi potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek Sumber Daya Manusia (Ramli, 2017). Permasalahan lain yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa adalah adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Berdasarkan informasi dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa, telah menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pengaduan tersebut diduga adanya suatu tindak penyelewengan dan penyalahgunaan dalam keuangan desa. Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa mengemukakan telah memeriksa beberapa Kepala Desa terkait. Dengan adanya kasus dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa maka prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan menumbuhkan sikap kepercayaan publik (Gaung NTB 2018).

Desa Poto merupakan desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Poto ini merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa budaya dari 8(delapan) desa seIndonesia oleh Kemendikbud. Namun,desa Poto ini masih memiliki kekurangan dalam proses kinerjanya dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) serta Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDes) setiap tahunnya, dikarenakan

kurangnya kinerja Sumber Daya Manusianya. Desa Poto ini juga pernah terjadi adanya tindak korupsi atau penyalahgunaan dana desa. (A. Yani,2019).

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau bisa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument terkunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan dan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Poto merupakan desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Poto Terdapat 7 Dusun, yaitu dusun Poto, dusun Bekat, dusun Tengke A, dusun Tengke B, dusun Samri, dusun Bekat Tengah, dusun Bekat Pungka. Desa Poto sendiri berbatasan langsung dengan 3 Desa dan 1 Kelurahan.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nafidah dan Nur Anisa (2017) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan keuangan desa terdapat satu indikator yang tidak sesuai yaitu tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Di Desa Poto Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati pada bulan Februari 2018.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan keuangan desa terdapat satu indikator yang tidak sesuai yaitu tentang Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Di Desa Poto Bendahara desa tidak menyimpan uang dalam kas desa. Bendahara hanya menyimpan uang dalam rekening kas desa.

3. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan keuangan desa di Desa Poto telah sesuai dengan indikator Peraturan Bupati Sumbawa.

4. Pelaporan

Dalam tahap Pelaporan keuangan desa di Desa Poto telah sesuai dengan indikator Peraturan Bupati Sumbawa.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap Pertanggungjawaban keuangan desa terdapat satu indikator yang tidak sesuai yaitu peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Di Desa Poto Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri dengan Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, format Data Barang Milik Desa, format Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator yang terdapat dalam analisis transparansi keuangan desa sudah sesuai yaitu Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi berupa papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Di Desa Poto segala bentuk informasi diinformasikan kepada masyarakat berupa pamphlet atau baliho yang di tempel di papan informasi. Selain itu juga di informasikan kepada masyarakat melalui pengeras suara di mesjid karena desa poto belum mempunyai radio komunitas untuk penyebaran informasi.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Poto telah dikelola secara baik dan akuntabel serta transparan. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada indikator (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa pper 31 Desember Tahun berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Saran

1. Bagi BPD Poto yaitu lebih mengontrol dan lebih mengawasi lagi pemerintah desa poto terkait dengan pengelolaan keuangan desa agar terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa.
2. Bagi Pemerintah Daerah selalu memberikan arahan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Aparatur Desa Poto untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih efektif dalam mengayomi masyarakatnya dan agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta website desa agar segera diaktifkan untuk memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses informasi terkait dengan Desa Poto secara mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, D A E. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Baru Tahun Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Arifiyanto, D F. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. Vol. 2 Nomor 3 (2014).
- Bupati Sumbawa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dewa, Ni K J K. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 Nomor 1 (2015).
- Hanifah, S I. 2015. Akuntansi dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4 Nomor 8 (2017).
- Herybertus Y,P. 2018. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Jatimulyo Girimulyo Kabupaten Jember Kulon Progo. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
- Khairiyyah, F. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2016). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. Vol. 6 Nomor 1 (2018).
- Putra, Putu A S., Sinarwati Kadek & Wahyuni Made Arie. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuhan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 8 Nomor 2 (2017).
- Ramdania, R. 2019. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 2017. Bupati Sumbawa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokusmedia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V W. 2015 *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.